
EDU RILIGIA

JURNAL ILMU PENDIDIKAN DAN KEAGAMAAN

Available online <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/eduriligia/index>

MODERNISASI PENDIDIKAN ISLAM INDONESIA PERKEMBANGAN KURIKULUM MADRASAH SERTA DAMPAK POSITIF DAN NEGATIFNYA

Muhammad Arifin Ritonga

arifinritonga86@gmail.com

Mahasiswa Doktoral Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

MODERNIZATION OF INDONESIAN ISLAMIC EDUCATION, THE DEVELOPMENT OF THE MADRASAH CURRICULUM AND ITS POSITIVE AND NEGATIVE IMPACTS

Muhammad Arifin Ritonga

arifinritonga86@gmail.com

Mahasiswa Doktoral Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak

Madrasah adalah lembaga pendidikan berbasis agama yang telah lama ada di Indonesia yang berupaya secara aktif mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kecakapan hidup dengan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan akhlak mulia, serta segala keterampilan yang mungkin diperlukan dalam masyarakat. Bangsa dan negara. Perkembangan kurikulum madrasah di Indonesia tidak terlepas dari sejarah awal masuk Islam dan perkembangannya sejak masa pra-kemerdekaan. Secara umum kurikulum madrasah memiliki variasi yang berbeda-beda tergantung situasi dan kondisi di berbagai tempat. Sejak sebelum kemerdekaan hingga era reformasi saat ini, Madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam telah mengalami berbagai perkembangan kurikulum. Baik berupa perubahan total dari sebelumnya atau hanya sebatas editan untuk perbaikan.

Kata Kunci: Indonesia, Islam, Pendidikan

Abstract

Madrasas are religious-based educational institutions that have long existed in Indonesia that seek to actively develop the potential in students to have life skills with spiritual, intellectual, emotional intelligence and noble character, as well as all skills that may need in society. Nation and state. The development of the madrasa curriculum in Indonesia is inseparable from the early history of converting to Islam and its development since pre-independence times. In general, the madrasa curriculum has different variations depending on the situation and conditions in various places. From pre-independence until the current reform era, Madrasas, one of the Islamic educational institutions, have experienced various curriculum development. Both in the form of a total change from before or only limited to edits for improvement..

Keywords: Indonesia, Islamic, Education

PENDAHULUAN

Madrasah merupakan lembaga pendidikan berbasis agama yang sudah lama ada di negara Indonesia yang berupaya untuk secara aktif dapat mengembangkan potensi dalam diri peserta didik agar memiliki *life skill* dengan bekal spiritual, intelektual, kecerdasan emosional dan akhlak mulia, serta segala keterampilan yang mungkin diperlukan dalam masyarakat, bangsa dan negara. Perkembangan kurikulum madrasah di Indonesia tidak terlepas dari sejarah awal masuk agama Islam dan perkembangannya sejak zaman pra-kemerdekaan hingga sekarang. Secara garis besar kurikulum madrasah memiliki variasi yang berbeda-beda tergantung situasi dan kondisi yang terjadi di berbagai macam tempat.

Keberadaan kurikulum dalam dunia pendidikan sudah menjadi perhatian semenjak zaman Yunani klasik hingga sekarang. Hal ini sebagaimana juga ditulis dalam *Encyclopedia of Educational Research*¹ pada pertengahan abad ke-20, konsepsi umum tentang kurikulum adalah perencanaan, sistem, bidang studi, pengalaman, dan isi. Kurikulum sebagai rencana mengacu pada konten atau keterampilan apa yang diantisipasi oleh pendidik untuk diajarkan. Kurikulum sebagai sistem mengacu pada orang, proses, dan struktur organisasi yang memandu perencanaan, pengajaran, dan pengukuran konten yang diajarkan.

Keberadaan kurikulum selanjutnya secara lebih factual dan terkonsepsi dalam pendidikan Islam dapat dilihat ketika kiblat kemajuan peradaban dan pendidikan berada di dunia Islam. Pada masa hidup Nabi Muhammad SAW, materi pendidikan Islam atau kurikulum pendidikan Islam sudah ada, meski dalam bentuk yang sangat terbatas. Hal demikian karena pendidikan pada saat itu masih dilaksanakan dalam bentuk informal yang mana secara kelembagaan berada di rumah Rasulullah dan para sahabat; dan ada juga yang berbentuk non formal seperti pengkhususan pada beberapa tempat, seperti masjid.

Isi pendidikan atau kurikulum pada saat itu berupa ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang bermuatan tentang kepercayaan, hukum-hukum syariah,

dan muamalah, pelajaran sastra Bahasa arab dan tata bahasanya, pelajaran membaca, menulis, dan puisi-puisi Arab. Singkatnya, menurut Ali Ashraf² kurikulum pendidikan Islam saat itu masih sebatas berupa materi pelajaran al-Quran, al-Hadits dan Bahasa. Semenjak itu kemudian, pada zaman sahabat dan tabiin setelah mereka, kurikulum Pendidikan Islam pun mengalami perkembangan sesuai dengan kondisi zaman dan bahkan konteks sosial politik eranya.

Melompat jauh dari sejarah kurikulum Pendidikan Islam kala itu, kini dalam konteks lembaga Pendidikan Islam di Indonesia yaitu madrasah, pun demikian mengalami berbagai macam perkembangan kurikulum. Mulai dari sebelum istilah kelembagaan madrasah belum dikenal di tanah air yaitu pada zaman pra-kemerdekaan hingga ia menjadi salah satu lembaga Pendidikan resmi di negara ini pasca-kemerdekaan.

KURIKULUM MADRASAH

Defenisi kurikulum sebenarnya dapat ditinjau dari tiga sudut pandang; *Pertama*, tinjauan dari sudut pandang etimologis atau kebahasaan; *Kedua*, pengertiannya dari tinjauan terminologi atau menurut pengertian yang bersifat tradisional; dan *ketiga* pengertian kurikulum dari sudut pandang terminologi modern.

Dari sudut pandang etimologis (kebahasaan), istilah kurikulum dinyatakan berasal dari kata-kata dalam bahasa Latin, yakni *currere (infinitif) atau corro (present active)*, yang berarti *run, hurry, hasten, speed, move, travel, processed (transitive)* dan *of a race (transitive)*. Selanjutnya istilah tersebut diadopsi ke dalam bahasa Inggris, melahirkan istilah '*course*', '*racecourse*' atau '*racetrack*'. Istilah '*course*' berarti "*a direction or route taken or to be taken*".³

Dalam kamus Webster⁴ istilah *course* tersebut diartikan: lapangan pacuan kuda, jarak tempuh untuk lomba lari, perlombaan, pacuan balapan, peredaran, gerak berkeliling, lapangan perlombaan, gelanggang, kereta balap, dan lain lain". Selanjutnya dalam dunia Pendidikan muncul istilah *curriculum* (kata

tunggal/*singular*), *curricula* atau *curriculums* (kata jamak/*plural*) yang berarti: (1) *a course of study in one subject at school or college*; (2) *a list of all the courses of study offered by a school or college*; (3) *any programme or plan of activities*.⁵

Pemakaian istilah kurikulum atas dasar persesuaian makna tersebut juga dipakai dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab istilah kurikulum disebut "*minhaj*" yang berarti "jalan yang terang"; cara, metode, bagan, rencana. Dari istilah itu dikenal istilah "*minhaj al ta`lim*" yang berarti "rencana pengajaran atau kurikulum pembelajaran. Dalam bentuk lain dikenal pula istilah "*minjah al diraasi*" (kurikulum mata pelajaran) atau "*minhaj al mardasah*" (kurikulum sekolah/madrasah).⁶

Menurut pandangan tradisional, kurikulum dimaknai sesuai arti etimologis kurikulum, yaitu sebagai sejumlah mata/materi pelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik pada suatu sekolah. Hal itu sebagaimana dikemukakan oleh Zais⁷ bahwa kurikulum adalah: "*a recourse of subject matters to be mastered*".

Senada dengan pemaknaan di atas, al-Syaibani⁸ sebagai tokoh pendidikan Islam, menggambarkan pengertian *minhaj* sebagai padanan istilah kurikulum dalam bahasa Arab yakni berupa pengetahuan-pengatahuan yang dikemukakan oleh guru atau sekolah dalam bentuk mata pelajaran-mata pelajaran atau kitab-kitab karya ulama terdahulu, yang dikaji begitu lama oleh para peserta didik dalam setiap tahapan pendidikannya.

Dalam pandang tradisional ini kurikulum diartikan hanya sebatas apa yang menjadi isi pendidikan atau pembelajaran yang harus dikuasai dan diberikan dalam sebuah proses pendidikan, khususnya pendidikan yang dilaksanakan di sekolah-sekolah. Dengan demikian, pengertian tradisional ini disebut juga pengertian kurikulum dalam pengertian yang sempit. Kurikulum dalam artian sempit ini umumnya dianut atau dipakai pada konsep dan praktik pendidikan masa lalu. Akan tetapi, tidak berarti bahwa konsep dan praktik pendidikan pada saat ini tidak memakai lagi pengertian dalam pandangan sempit ini. Masih banyak lembaga pendidikan dan dalam kondisi tertentu masih menggunakan pengertian kurikulum dalam pandangan sempit ini.

Menurut pengertian yang modern, kurikulum tidak hanya berisi mata pelajaran atau materi yang harus dikuasai oleh siswa, tetapi juga berisikan hal-hal lain yang dipandang bisa memberi pengaruh terhadap proses pencapaian tujuan pendidikan atau pembentukan siswa sesuai yang diinginkan.

Pendefinisian secara modern diungkapkan oleh Stratemeyer⁹ yang menyatakan kurikulum sebagai *the sum total of the school's effort to influence learning wither in the classroom, on playground or on out of school*, atau jumlah total dari upaya sekolah untuk mempengaruhi pembelajaran di kelas, di taman bermain atau di luar sekolah. Dalam hal ini Stratemeyer memandang kurikulum sebagai sejumlah usaha sekolah untuk mempengaruhi pembelajaran, baik di dalam kelas, lapangan bermain, atau di luar sekolah.

Adapun istilah pengembangan kurikulum sering dirujuk dari istilah "*development curriculum*" (pengembangan kurikulum). Schubert¹⁰ menyatakan bahwa kadang istilah *curriculum development*, disamakan dengan *curriculum design* dan *curriculum planning*. Dalam konteks pertama, *curriculum development* dinyatakan sebagai *refers to the process of deciding what to teach and learn*, atau mengacu pada proses memutuskan apa yang akan diajarkan dan dipelajari. Sedangkan dalam konteks istilah kedua *curriculum development*, diartikan sebagai suatu upaya merancang kurikulum (*creation of curriculum*).

Secara factual, kegiatan yang dilakukan dalam pengembangan kurikulum lebih bersifat konseptual daripada material. Kegiatan tersebut meliputi penyusunan, pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan, setidaknya demikian penurutan Winarno Surachmad.¹¹ Dengan demikian, kegiatan pengembangan kurikulum adalah merupakan kegiatan menghasilkan kurikulum.

Terlepas dari perdebatan tentang istilah yang digunakan untuk istilah pengembangan kurikulum, sebagaimana dikemukakan di atas, secara garis besar pengembangan kurikulum dapat dikelompokkan dalam dua bentuk, yaitu:¹²

- a. Pengembangan kurikulum yang baru (*curriculum construction*).

Pengembangan kurikulum ini adalah pengembangan kurikulum yang

dilakukan untuk satu lembaga pendidikan yang baru, atau untuk sebuah mata pelajaran baru, atau dapat juga untuk sebuah kegiatan pembelajaran yang baru, yang sebelumnya sama sekali belum ada kurikulumnya;

- b. Menyempunakan kurikulum yang telah ada (*curriculum reconstruction*). Pengembangan kurikulum yang merupakan rekonstruksi kurikulum yang telah ada adalah pengembangan kurikulum yang telah dianggap ketinggalan. Pengembangan kurikulum dalam bentuk memperbaiki kurikulum yang telah ada menjadi sebuah konsep kurikulum yang baru.

Adapun Kurikulum madrasah sejak pra-kemerdekaan, pasca-kemerdekaan hingga era Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri dan setelahnya berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi pada zamannya. Hal itu menjadikan bentuk sistem dan materi kurikulum bervariasi sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing zaman. Di antara perkembangan itu adalah sebagai berikut:¹³

a. Kurikulum Pendidikan Islam sebelum kemerdekaan

1) Masa Kerajaan Islam (13 M - 16 M);

Bentuk lembaga pendidikannya adalah Masjid dan Pesantren, bentuk kurikulumnya belum terstruktur, dengan tiga (3) tingkatan, yaitu dasar, lanjutan dan spesialisasi. Pada tingkat dasar, metode yang digunakan adalah hafalan dan *halaqah* dengan rangkaian materi antara lain: (1) pengenalan huruf hijaiyah hingga *khatam* al-Qur'an; (2) Dasar-dasar keislaman (praktik ibadah, rukun iman dan rukum Islam). Pada tingkat lanjutan, metode yang digunakan adalah *sorogan*, *wetonan* dan *halaqah*, dengan materi antara lain: pembacaan *barzanzi*, Ilmu Tajwid, dan beberapa kitab-kitab kuning. Terakhir pada tingkat spesialisasi, metode yang digunakan sama seperti pada tingkat lanjutan, namun materinya sudah lebih dalam, yaitu seperti fiqih baik umum maupun ibadah, tata Bahasa arab, ushuluddin atau ilmu kalam, tasawwuf, tafsir bahkan tarekat.

2) Masa Kerajaan Islam (17 M - 19 M)

Pada masa ini bentuk lembaga Pendidikan islam *madrassa* adalah Surau dan Meunasah untuk *Ibtidaiyah*, Rangkang untuk *Tsanawiyah* dan Dayah untuk tingkatan *Aliyah* dan juga untuk tingkatan perguruan tinggi atau *jami'ah*. Adapun bentuk kurikulumnya adalah kurikulum dasar dan kurikulum mata pelajaran terpisah. Muatan-muatan materinya untuk dasar antara lain yaitu: menulis dan membaca huruf arab, ilmu agama, sejarah islam, Bahasa melayu. Sedangkan untuk tingkatan berikutnya yaitu: Bahasa arab, ilmu bumi, sejarah, ilmu hitung, akhlak, tauhid, tasawuf, tata negara dan ilmu faraid serta ilmu falak.

- 3) Masa Kolonialisme Belanda dan Jepang (sebelum 1909 di Jawa)
Pada era ini lembaga Pendidikan islam dalam bentuknya sudah diperkenalkan kekhususan, yaitu Sistem Pendidikan Bumi Putera (Keraton dan Pertapa). Namun kurikulumnya masih belum terstruktur, karena Pendidikan keraton dikhususkan untuk para bangsawan kalangan keraton sedangkan Pendidikan pertapa diperuntukkan untuk semua kalangan. Materinya pun terkesan sederhana, yaitu sebatas membaca al-Qur'an dan pengetahuan dasar agama. Di samping itu, sistem Pendidikan surau atau langgar tetap ada dengan bentuk kurikulum mata pelajaran terpisah. Dengan menggunakan metode ceramah, membaca dan menghafal, materi-materi yang dipelajari masih seputar: membaca al-Qur'an, dasar-dasar keislaman dan praktiknya. Lembaga Pendidikan islam berbentuk pesantren sudah mulai dikenal dengan tetap pada bentuk kurikulum terpisah yang masih menggunakan metode *sorogan*, *wetonan* dan *halaqah*. Materinya juga masih berkutat pada fikih, Bahasa arab, tasawuf, tafsir dan tarekat.
- 4) Masa Kolonialisme Belanda dan Jepang (sebelum 1909 di Sumatera)
Berbeda di Pulau Jawa, pada era yang sama di Sumatera memiliki bentuk lembaga yang lain pula. Di Sumatera sudah dikenal nomenklatur *Madrasah Diniyah* (Ibtidaiyah 4 tahun), *Madrasah Diniyah* (Tsanawiyah 4 tahun) dan *Madrasah Diniyah* (Aliyah 4

Tahun). Namun demikian, penamaan kurikulumnya masih juga *separated subject curriculum*¹⁴ atau kurikulum dengan mata pelajaran terpisah yang terbagi ke dalam tiga tingkatan: dasar, menengah dan lanjutan. Hal yang baru adalah dalam metodenya sudah mulai dikenal dengan: metode langsung (*direct method*), drill, ceramah dan induktif-deduktif. Dari sisi muatan, pada tingkatan dasar sudah dimuat ilmu pengetahuan umum di samping ilmu agama dan Bahasa arab.

b. Kurikulum Pendidikan Islam setelah kemerdekaan

Setelah kemerdekaan, kebijakan pemerintah terkait pendidikan Islam dan madrasah dibagi beberapa periode yaitu periode orde lama, orde baru dan reformasi, di mana pada awal orde baru madrasah mendapatkan pengakuan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 1950 dan Peraturan Dua Menteri tanggal 20 Januari 1951 kemudian berkembang hingga masa reformasi sekarang ini.

1) Kurikulum Madrasah Masa Orde Lama (1945-1965)

Lembaga Pendidikan Islam Madrasah pada masa ini ada beberapa macam, ada Sekolah Guru Agama Islam (SGAI) dengan lama masa Pendidikan selama 5 tahun dan Sekolah Guru Hakim Agama Islam (SGHAI) selama 4 tahun. Di samping itu terdapat Madrasah Ibtidaiyah 6 tahun Pendidikan, Madrasah Tsanawiyah dengan 4 tahun Pendidikan, dan Madrasah Aliyah dengan 4 tahun Pendidikan.

Bentuk kurikulum secara keseluruhan masih *separated subject curriculum*. Dari sisi materi muatannya, pada SGAI terdapat materi agama dan umum; pada SGHAI lebih beragam antara lain: sastra, ilmu alam, ilmu agama, dan ilmu Pendidikan agama. Terakhir, untuk tingkatan ibtidaiyah, tsanawiyah dan Aliyah secara umum telah memuat muatan materi agama dan juga umum.¹⁵

2) Kurikulum Madrasah Masa Orde Baru (1966-1974)

Di masa orde baru tahun 1966 – 1974 kurikulum pada lembaga Pendidikan islam madrasah mengalami perubahan, dari *separated* ke bentuk organisasi kurikulum *correlated subject curriculum*.¹⁶ Adapun

muatan kurikulumnya yaitu: (1) pada tingkat ibtidaiyah, Ilmu Agama sebanyak 60% dan Ilmu Umum sebanyak 40%; (2) pada tingkat tsanawiyah, Ilmu Agama 60% dan Ilmu Umum sebanyak 40%; (3) pada tingkatan Aliyah, Ilmu Agama 60% dan Umum 40%.

3) Kurikulum Madrasah Masa Orde Baru (SKB 3 Menteri 1975-1984)

Kurikulum madrasah mengalami perubahan yang signifikan secara persentase muatannya di masa Surat Keputusan Bersama 3 Menteri pada tahun 1975 sampai 1984 diberlakukan.¹⁷ Pada era ini, baik pada tingkatan ibtidaiyah, tsanawiyah maupun Aliyah; di mana muatan kurikulumnya yaitu ilmu agama sebanyak 30% sedangkan muatan ilmu umum sebesar 70%.

4) Kurikulum Madrasah Masa Orde Baru (SKB 2 Menteri 1984)

Di masa penerapan Surat Keputusan Bersama 2 Menteri di tahun ini sebagai perubahan peraturan atas SKB sebelumnya, pada hakikatnya tidak ada perubahan yang signifikan dari sisi kelembagaan, di mana madrasah tetap pada tingkatan Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah. Namun di masa ini diperkenalkan nomenklatur kurikulum yang baru, yaitu *content based curriculum*¹⁸, atau kurikulum berdasarkan isi atau muatan; dan juga diperkenalkan metode belajar yang baru yaitu Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA). Di samping itu, melalui peraturan ini juga muatan kurikulum ilmu-ilmu agama dijadikan sebagai program inti, sedangkan ilmu-ilmu umum sebagai program pilihan.

5) Kurikulum Madrasah Masa Orde Baru (1987)

Di masa ini, selain madrasah ibtidaiyah dan tsanawiyah, pada tingkatan aliyah diperkenalkan Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK). Namun demikian, bentuk kurikulumnya tetap masih mengacu pada CBC dengan perubahan isi muatannya. Yang sebelumnya ilmu agama sebagai program inti dan umum sebagai pilihan, kini dirobah lagi dengan matapelajaran agama sebanyak 70% dan mata pelajaran umum sebesar 30%.

6) Kurikulum Madrasah Masa Orde Baru (1994)

Pada masa ini kurikulum madrasah berubah pendekatan dari *content based* ke arah *objective based curriculum*. Secara kelembagaan madrasah tetap pada tingkatan ibtdaiyah, tsanawiyah dan Aliyah tanpa adanya program-program pengkhususan. Secara muatan, kurikulum 94 ini tidak berbeda dari sebelumnya, yaitu tetap pada proporsi muatan 70% mata pelajaran agama dan 30% umum. Oleh karena dianggap tidak ada perbedaan secara mendasar dengan kurikulum sebelumnya, sering kurikulum ini digabungkan dalam periodisasi perkembangannya menjadi kurikulum 75, 84 dan 94.

7) Kurikulum Madrasah Masa Reformasi (2004)

Enam tahun setelah reformasi terjadi di Indonesia dari sisi politik, pada sisi kurikulum Pendidikan juga mengalami reformasi yang signifikan. Menyikapi perubahan struktural dalam pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralis, kurikulum 1994 perlu disempurnakan. Itu konsekuensi logis dari penerapannya Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Kurikulum yang berkembang pada saat itu disebut Kurikulum Berbasis Kompetensi yang menitikberatkan pada pengembangan kemampuan melaksanakan (kompetensi) tugas sesuai dengan standar kinerja tertentu yang telah ditetapkan.¹⁹ Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti, kompetensi adalah sekumpulan tindakan cerdas, sehingga seseorang yang berkompoten mempunyai tanggung jawab penuh sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas di bidang pekerjaan tertentu.

Dengan perubahan pendekatan ke Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), maka metode pembelajaran, yang sebelumnya mengandalkan Ceramah, Hafalan dan dilengkapi dengan CBSA, kini berubah menjadi PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan) dan CTL (*Contextual Teaching Learning*). Adapun dari sisi muatannya, kurikulum berbasis kompetensi ini tetap sama dengan sebelumnya, yaitu muatan pelajaran agama 70% dan

selainnya sebanyak 30%.

8) Kurikulum Madrasah Masa Reformasi (2006)

Pada tahun 2006 terjadi lagi pergantian kurikulum pada madrasah di Indonesia, dari berbasis kompetensi ke berbasis tingkat satuan Pendidikan masing-masing lembaga atau disebut dengan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). KTSP atau SBK (Sekolah Berbasis Kurikulum) adalah kurikulum yang dikembangkan secara operasional dan dilaksanakan di setiap satuan pendidikan (sekolah). Kurikulum ini dilaksanakan berdasarkan beberapa regulasi, yaitu: (a) Undang-Undang (UU) No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (b) Undang-Undang (UU) No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, termasuk dalam Pendidikan; (c) Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. (d) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi (SI); (e) Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL); dan terakhir, (f) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penerapan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan.

Perbedaan mendasar antara Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Kurikulum Berbasis Sekolah (KTSP) sebenarnya tidak ada. Keduanya memiliki seperangkat rencana berorientasi kompetensi dan hasil belajar siswa. Sisi perbedaannya hanya pada pelaksanaan teknisnya; jika KBK disiapkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan khususnya pada Bidang Puskur, maka KTSP disusun oleh jenjang pendidikan masing-masing satuan; dalam hal ini sekolah yang bersangkutan meskipun tetap mengacu pada pedoman nasional. Pedoman Penyusunan Kurikulum disusun oleh lembaga independen yaitu Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Dalam kurikulum ini, muatan materi agama tetap pada porsi 70% sedangkan materi umum stabil di bagian 30%. Hal yang menjadi tambahan dari sisi metode pengajaran ialah telah dilibatkannya model *inquiry* dan berbagai macam metode pembelajaran lainnya, sesuai dengan perkembangan teori-teori Pendidikan dan pengajaran yang ada.

9) Kurikulum Madrasah Masa Reformasi (2013)

Kurikulum terbaru yang diterapkan dalam pendidikan Indonesia secara umum dan juga madrasah adalah Kurikulum 2013 (K-13). Penerapan kurikulum 2013 ini dimulai pada bulan Juli Tahun 2013; Namun demikian, saat itu implementasi masih untuk sekolah atau madrasah pada jenjang pendidikan tertentu. Yang menjadi sasaran kurikulum 2013 adalah menghasilkan manusia Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui pemberdayaan terintegrasi sikap, keterampilan, dan pengetahuan.

Perbedaan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013 terletak pada perencanaan pembelajaran. Dalam kurikulum 2006, pengembangan silabus berada di bawah kewenangan satuan pendidikan (sekolah); Namun, dalam kurikulum 2013 pengembangan menjadi kewenangan pemerintah pusat, kecuali untuk mata pelajaran khusus yang dikembangkan oleh sekolah tertentu seperti muatan lokal. Meski silabusnya berasal dari pemerintah pusat, guru tetap memiliki kewenangan untuk merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan mengembangkan materi yang diberikan untuk operasionalisasi dalam pembelajaran.²⁰

Dari jbaran di atas, jika diuraikan secara singkat maka perkembangan kurikulum pada lembaga pendidikan madrasah, berdasarkan catatan sejarah menurut Haidar Putra Daulay²¹ dapat dibagi dalam tiga fase. Pertama, sekitar

tahun 1945–1974. Pada fase ini madrasah menekankan materi pendidikannya padapenyajian ilmu agama, dan sedikit pengetahuan umum.

Kedua, pada periode Mukti Ali (mantan Menteri Agama RI), ada kebijakan SKB 3 Menteri yang berusaha mensejajarkan kualitas madrasah dengan sekolah dengan porsi kurikulum 70% umum dan 30% agama. Kebijakan tersebut ditangkap oleh para pembina dan pengelola madrasah tidak utuh, sehingga yang terjadi penguasaan pengetahuan umum dan agama, keduanya masih dangkal. Di masa Menteri Agama Munawir Sadzali, beliau menawarkan konsep MAPK (Madrasah Aliah Program Khusus), yaitu suatu program yang bertujuan untuk peningkatan penguasaan ilmu-ilmu keislaman, namun juga belum menghasilkan sesuai rencana.

Dan terakhir, fase ketiga yaitu setelah diberlakukannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 2 Tahun 1989) dan diiringi dengan sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 dan 29, serta dituntaskan dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Madrasah mendapat legaslitas persamaan dan kesetaraan sebagai bagian sistem Pendidikan Nasional. Pasal 17 ayat (2) menyebutkan, *“Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTS) atau bentuk lain sederajat”*.

Kebijakan ini dapat menggembirakan karena meningkatkan status madrasah yang selama ini dianggap lembaga pendidikan terbelakang, namun begitu dapat juga mengkhawatirkan, karena kurikulum 70 – 30 saja menunjukkan hasil belajar lulusannya serba tanggung.

ANALISIS DAMPAK POSITIF PERGANTIAN KURIKULUM

Adanya pengembangan kurikulum baik dalam terma pergantian total ataupun penyempurnaan dari sebelumnya tentu telah dikaji dan diteliti terlebih dahulu kemudian didesain setelah menelaah lebih lanjut apa saja yang menjadi kendala pada kurikulum sebelumnya. Dari sini kurikulum yang baru mestinya

bertujuan untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada pada kurikulum sebelumnya.

Sebelum mengadakan pergantian tersebut, para pengambil kebijakan telah mengambil pengalaman dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dari kurikulum sebelumnya, kemudian merumuskan solusi kebijakan yang nantinya di terapkan pada kurikulum yang baru. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan peningkatkan mutu Pendidikan itu sendiri.

Di samping itu, zaman yang begitu cepat berubah dan berkembang pastinya memaksa suatu sistem pendidikan yang mampu menjawab tantangan-tantangan yang ada. Dalam ranah inilah kurikulum yang baru berfungsi untuk menghadapi tantangan masa depan akibat tuntutan perubahan zaman tersebut dan tetap mampumerealisasikan tujuan Pendidikan.

Para guru, murid dan proses pembelajaran yang dalam hal ini merupakan subjek pelaksana sekaligus objek terdampak dari sebuah kebijakan pengembangan kurikulum, tentunya dapat merasakan dampak positif dari perubahan yang ada. Contoh yang terkhusus dalam hal ini yaitu pada kurikulum 2013; dampak positif yang dirasakan adalah mengarah kepada proses pembelajaran yang berlangsung seperti pembelajaran yang bersifat *student center* atau berpusat pada siswa, relasi antara guru dan siswa yang semakin baik, pembelajaran yang lebih kontekstual dengan keadaan masa kini, sampai kepada kreativitas guru dan penanaman pendidikan karakter dan pendidikan budi pekerti.

ANALISIS DAMPAK NEGATIF PERGANTIAN KURIKULUM

Di samping hal-hal yang berbau positif, tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan kurikulum yang kadang begitu cepat juga membawa arus negatif. Unsur paling penting semestinya yang harus dipikirkan matang dalam mensukseskan kurikulum yang baru adalah tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap dan profesional dalam pengimplementasian tiap adanya pengembangan kurikulum ini. Oleh karena, bagaimana pun baiknya kurikulum

diorganisasikan jika tidak didukung oleh SDM yang mumpuni, maka nantinya kurikulum tersebut tidak akan dapat disampaikan atau dipraktekkan dalam proses pembelajaran. Sebagai korban utamanya sudah barang tentu ialah siswa.

Selain itu, sebelum mengadakan perubahan yang signifikan dalam struktur kurikulum, utamanya yang terkait dengan wajibnya keberadaan fasilitas yang memadai untuk penerapan kurikulum tersebut, maka sarana dan prasarana di lembaga-lembaga Pendidikan seyogyanya jadi bahan kajian. Fasilitas yang tidak merata di semua daerah di sebuah negara dapat menjadi salah satu kendala pelaksanaan kurikulum tidak berjalan lancar.

Lebih jauh, bahwa dengan cepatnya proses perkembangan kurikulum namun tidak disertai dengan kecepatan dalam sosialisasi atau lebih jauh lagi adanya kebijakan Pendidikan dan pelatihan terhadap guru tentang kurikulum tersebut, maka tidak ada jaminan bahwa guru akan mengimplementasikan kebijakan kurikulum sesuai harapan pemerintah.

Dampak dari kurikulum pendidikan yang bergonta ganti bukan hanya memberikan dampak negatif terhadap siswa yang semakin merendah prestasinya, sebetulnya perubahan ini juga dapat berdampak pada sekolah yaitu pada tujuan atau visi sebuah sekolah juga akan ikut kacau. Mungkin pemerintah merasa bahwa perubahan kurikulum dapat memberi perubahan yang lebih baik pada mutu pendidikan, tapi boleh jadi nyatanya tidak demikian.

KESIMPULAN

Dari pemaparan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa kurikulum bukan hanya sebatas materi-materi ajar yang mesti dijejalkan kepada kepala peserta didik, namun lebih jauh dari itu ialah seluruh upaya yang diusahakan oleh seluruh stake holder Pendidikan dalam membentuk kepribadian siswa sesuai dengan garis besar tujuan Pendidikan nasional dan terkhusus Pendidikan islam.

Madrasah yang menjadi salah satu lembaga Pendidikan islam, semenjak pra-kemerdekaan sampai era reformasi sekarang ini telah mengalami berbagai macam pengembangan kurikulum. Baik dalam bentuk perubahan total dari sebelumnya maupun hanya sebatas *edit-an* untuk perbaikan.

Deras dan cepatnya arus pengembangan atau perubahan kurikulum tersebut sudah barang tentu membawa akibat baik dan buruk. Sisi positifnya, perubahan ini mampu mengentaskan masalah-masalah serius yang dihadapi guru dan yang dirasakan oleh siswa serta dalam proses pembelajaran pada bentuk kurikulum lama. Namun di sisi lain, tidak jarang, mengingat luas dan banyaknya lembaga Pendidikan madrasah, kadang perubahan kurikulum tidak dibarengi dengan sosialisasi, Pendidikan dan pelatihan bagi guru sebagai subjek dan objek sekaligus dalam kurikulum.

CATATAN KAKI

¹ Bruce B Frey, 2018. *The SAGE Encyclopedia of Educational Research, Measurement and Evaluation*, (California: Sage Publication), p. 445

² Ali Ashraf, 1985. *New Horizons in Muslim Education*, (London: Hodder and Stoughton), h. 29

³ Syaifuddin Sabda, 2015. *Pengembangan Kurikulum*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo), h. 21

⁴ <https://www.merriam-webster.com/dictionary/course>, diakses 14 Januari 2021

⁵ <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/curriculum>, diakses 14 Januari 2021.

⁶ Lihat Syaifuddin Sabda, *Pengembangan Kurikulum...*, h. 23

⁷ Robert S. Zais, 1976. *Curriculum Principal and Foundation*, (New York: Toms Ciowell Company), p. 7

⁸ Omar Muhammad Al-Thoumy Al-Syaibani, 1979. *Filsafat Pendidikan Islam*, terj. Hasan Langgulung, (Jakarta: Bulan Bintang), h. 14

⁹ Florence Barbara Stratemeyer, 1957. *Developing Curriculum For Modern Living*, (Columbia: Columbia University Press), h. 9

¹⁰ William H Schubert, 1986. *Curriculum: Perspective, Paradigm and Possibility*, (New York: Macmillan Publisher), h. 41

¹¹ Winarno Surackmat, 1977. *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), h. 15

¹² Lihat Syaifuddin Sabda, *Pengembangan Kurikulum...*, h. 178

¹³ Hanif Fathoni, 2020. *Perkembangan Kurikulum Madrasah di Indonesia*, (IAIN Kediri, Prosiding Pascasarjana, Vol. 3), h. 91

¹⁴ Artinya segala bahan pelajaran yang disajikan dalam *subject*/mata pelajaran yang terpisah-pisah, yang satu lepas dari yang lain. Kurikulum ini menyajikan segala bahan pelajaran dalam berbagai macam mata pelajaran (*subjects*) yang terpisah-pisah satu sama lain, seakan-akan ada batas pemisah antara mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya juga antara kelas dengan kelas lainnya. Sekalipun hakikat isinya ada relasi antara mata pelajaran yang satu dengan pelajaran yang lain. Organisasi *separated subject curriculum* dianggap berasal dari zaman Yunani kuno. [Sulaiman, 2013, *Pola Modern Organisasi Pengembangan Kurikulum*, (Banda Aceh: Jurnal DIDAKTIKA, Vol. XIV, No. 1), h. 62] dan [S. Nasution, 2008, *Asas-Asas Kurikulum*, (Jakarta: Bumi Aksara), h. 137]

¹⁵ M. Sudin, 2012. *Pendidikan Islam Dan Pendidikan Nasional Dalam Kilasan Sejarah Singkat*, (Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman, Vol. 23, No. 2, doi: 10.33367/tribakti.v23i2.31), h. 81

¹⁶ Yaitu pengorganisasian kurikulum yang mengedepankan korelasi antara mata pelajaran, sebagai upaya untuk meminimalisir kelemahan-kelemahan sebagai akibat dari pemisahan mata pelajaran. [Oemar Hamalik, 2005. *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara), h. 28]

¹⁷ A. Nursyarief, 2014. *Pendidikan Islam Di Indonesia Dalam Lintasan Sejarah*, (Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Vol. 17, No. 2, doi: 10.24252/lp.2014v17n2a8), h. 262

¹⁸ *Is the concurrent teaching of academic subject matter and second language skills by providing students with authentic, meaningful academic contexts, it aims to develop both the students' language and their content knowledge*; yaitu pengajaran bersamaan dari materi pelajaran akademis dan keterampilan bahasa sekaligus dengan memberikan konteks akademis yang otentik dan bermakna kepada siswa, yang bertujuan untuk mengembangkan bahasa siswa dan pengetahuan kognitif mereka. [Yuko Goto Butler, 2005, *Content Based Instruction in EFL Contexts: Consideration for Effective Implementation*, (University of Pennsylvania, JALT Journal, Vol. 27, No. 2, DOI: 10.37546/JALTJJ27.2-5), h. 229

¹⁹ Sri Wahyuni, 2016. *Curriculum Development in Indonesia Context*, (UNIVERSUM, Vol. 10, No. 1, E-ISSN. 2502-8650), h. 76

²⁰ *Ibid.* h. 78

²¹ Haidar Putra Daulay, 2009. *Dinamika Pendidikan Islam di Asia Tenggara*, (Jakarta: RinekaCipta), h. 21

DAFTAR PUSTAKA

Al-Syaibani, Omar Muhammad Al-Thoumy, 1979. *Filsafat Pendidikan Islam*, terj. Hasan Langgunglung, (Jakarta: Bulan Bintang)

Ashraf, Ali, 1985. *New Horizons in Muslim Education*, (London: Hodder and Stoughton)

Butler, Yuko Goto, 2005, *Content Based Instruction in EFL Contexts: Consideration for Effective Implementation*, (University of Pennsylvania, JALT Journal, Vol. 27, No. 2, DOI: 10.37546/JALTJJ27.2-5)

Daulay, Haidar Putra, 2009. *Dinamika Pendidikan Islam di Asia Tenggara*, (Jakarta: Rineka Cipta)

- Fathoni, Hanif, 2020. *Perkembangan Kurikulum Madrasah di Indonesia*, (IAIN Kediri, Prosiding Pascasarjana, Vol. 3)
- Frey, Bruce B, 2018. *The SAGE Encyclopedia of Educational Research, Measurement and Evaluation*, (California: Sage Publication)
- Hamalik, Oemar, 2005. *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara) Nasution, S., 2008, *Asas-Asas Kurikulum*, (Jakarta: Bumi Aksara)
- Nursyarief, A., 2014. *Pendidikan Islam Di Indonesia Dalam Lintasan Sejarah*, (Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Vol. 17, No. 2, doi: 10.24252/lp.2014v17n2a8)
- Sabda, Syaifuddin, 2015. *Pengembangan Kurikulum*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo)
- Schubert, William H, 1986. *Curriculum: Perspective, Paradigm and Possibility*, (New York: Macmillan Publisher)
- Stratemeyer, Florence Barbara, 1957. *Developing Curriculum For Modern Living*, (Columbia: Columbia University Press)
- Sudin, M., 2012. *Pendidikan Islam Dan Pendidikan Nasional Dalam Kilasan Sejarah Singkat*, (Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman, Vol. 23, No. 2, doi: 10.33367/tribakti.v23i2.31)
- Sulaiman, 2013, *Pola Modern Organisasi Pengembangan Kurikulum*, (Banda Aceh: Jurnal DIDAKTIKA, Vol. XIV, No. 1)
- Surakhmat, Winarno, 1977. *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan)
- Wahyuni, Sri, 2016. *Curriculum Development in Indonesia Context*, (UNIVERSUM, Vol. 10, No. 1, E-ISSN. 2502-8650)
- Zais, Robert S., 1976. *Curriculum Principal and Foundation*, (New York: Toms Ciowell Company)

Internet:

<https://www.merriam-webster.com/dictionary/course>, diakses 14 Januari 2021.

<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/curriculum>, diakses 14 Januari 2021.